

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu kebijakan publik, terdapat banyak definisi mengenai kebijakan politik yang menekankan aspek-aspek yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena setiap ahli memiliki latar belakang yang berbeda serta menggunakan pendekatan dan model yang berbeda dalam mendefinisikan kebijakan publik. Menurut Budi Winarno, perbedaan dalam memberikan definisi kebijakan publik ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan pendekatan dan model yang digunakan⁷.

Berbagai definisi kebijakan publik mencerminkan sudut pandang yang berbeda dari para ahli, termasuk Budi Winarno, Robert Eyestone, dan Thomas R. Dye. Berikut adalah penjelasan mengenai definisi kebijakan publik menurut ketiga ahli ini berdasarkan kutipan dari Winarno (2016:19) dalam bukunya “Kebijakan Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif”.

Budi Winarno (2016:19) berpendapat bahwa istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam kegiatan tertentu⁸. Winarno menekankan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan atau perilaku yang diambil oleh aktor-aktor tertentu, baik individu maupun kelompok, dalam konteks aktivitas tertentu. Definisi ini menitikberatkan pada aspek perilaku dan aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan publik. Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016: 19), berpendapat bahwa “kebijakan publik secara luas diartikan sebagai hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.”.

Eyestone melihat kebijakan publik sebagai interaksi atau hubungan antara pemerintah dengan lingkungannya. Ini mencakup bagaimana kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh

⁷ Budi Winarno, “Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Komparatif”, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2016)), 19

⁸ Budi Winarno, *ibid*

dan mempengaruhi konteks eksternal, termasuk masyarakat, ekonomi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Di sisi lain, Dye yang dikutip Winarno (2016: 19) menyatakan bahwa “Kebijakan publik adalah studi tentang apa yang ingin dilakukan pemerintah dan apa yang tidak ingin dilakukan”. Dye menekankan bahwa kebijakan publik mencakup keputusan dan non-keputusan pemerintah. Namun, definisi ini mungkin kurang memadai karena bisa terjadi perbedaan antara niat dan realisasi kebijakan. Artinya, apa yang direncanakan oleh pemerintah tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dilakukan.

Sholichin Abdul Wahab mengajukan definisi dari W.I. Jenkins yang berpendapat kebijakan publik sebagai “*A set interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*”. (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi tertentu, di mana keputusan-keputusan ini, pada prinsipnya, berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya).

Jenkins menekankan bahwa kebijakan publik terdiri dari keputusan-keputusan yang saling terkait, yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta cara-cara untuk mencapainya. Kebijakan ini berada dalam kerangka kekuasaan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat⁹. Sedangkan menurut Chef J.O. Udoji, sebagaimana dikutip oleh Sholichin Abdul Wahab, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*an authorized course of action sanctioned by government or authoritative body*”. (sebuah tindakan yang telah disahkan yang disetujui oleh pemerintah atau badan berwenang).

Udoji menekankan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang telah mendapatkan persetujuan dan otorisasi dari pemerintah atau badan otoritatif lainnya. Fokusnya adalah pada aspek legitimasi dan otorisasi dari tindakan-tindakan kebijakan tersebut. Dengan memahami

⁹ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 4

berbagai definisi ini, kita dapat lebih baik dalam menganalisis dan memahami kebijakan publik, baik dari segi proses pengambilan keputusan maupun dari aspek legitimasi dan otorisasi¹⁰.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat efektif dan sesuai dengan kerangka hukum serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan publik harus dapat menyelesaikan konflik atas kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya¹¹.

Pengambilan kebijakan merupakan salah satu peran penting pemerintah. Keterampilan dan pemahaman yang tepat mengenai proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk menerapkan kebijakan publik yang cepat, akurat dan tepat. Memahami proses pengambilan keputusan politik juga perlu diimbangi dengan memahami kekuasaan yang dimiliki.¹²

Kebijakan publik mempunyai beberapa kategori: tuntutan politik (*policy demand*), keputusan politik (*policy Decision*), deklarasi politik (*policy statement*), hasil politik (*policy result*), dan konsekuensi politik (*policy effect*). sebagai Ciri-ciri kebijakan publik ini adalah:¹³

1) *Policy Demands* (Tuntutan-Tuntutan Kebijakan)

Permintaan dari pejabat swasta atau pemerintah kepada pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik untuk mengambil tindakan tertentu. *Policy demands* mencerminkan keinginan atau kebutuhan dari berbagai pihak yang menginginkan perubahan atau tindakan tertentu dari pemerintah. Tuntutan ini bisa datang dari warga negara, kelompok kepentingan, perusahaan, atau organisasi lainnya. Tuntutan ini kemudian direspons oleh pemerintah melalui proses pengambilan keputusan kebijakan.

2) *Policy Decisions* (Keputusan-Keputusan Kebijakan)

Keputusan otoritas pemerintah untuk menyetujui atau mengarahkan kebijakan publik, seperti undang-undang dan peraturan yang diperlukan. *Policy decisions* merupakan hasil dari proses deliberasi dan evaluasi oleh pembuat kebijakan.

¹⁰ Sholichin Abdul Wahab, *op. cit*), 5

¹¹ Leo Agustino, “*Dasar-dasar Kebijakan Publik*”, (Bandung: Alfabeta, 2017)), 15-18

¹² Uddin, B. Sore, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017)), 110-111

¹³ Budi Winarno, “*Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Komparatif*”, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2016)), 23

Keputusan ini menetapkan kebijakan yang akan diambil, seringkali dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau tindakan administratif lainnya. Keputusan ini memberikan dasar hukum dan arahan bagi implementasi kebijakan.

3) *Policy Statements* (Pernyataan-Pernyataan Kebijakan)

Pernyataan resmi kebijakan publik, misalnya: Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tujuan dan sasaran pemerintah serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. *Policy statements* adalah deklarasi resmi yang mengomunikasikan niat dan rencana pemerintah. Ini termasuk undang-undang, peraturan, serta dokumen kebijakan lain yang memberikan penjelasan tentang tujuan kebijakan dan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai.

4) *Policy Outputs* (Hasil-Hasil Kebijakan)

Apa yang sebenarnya dilaksanakan sesuai dengan suatu keputusan atau pernyataan kebijakan. *Policy outputs* merujuk pada tindakan nyata yang diambil pemerintah berdasarkan keputusan dan pernyataan kebijakan. Ini termasuk implementasi program, penyediaan layanan publik, atau penegakan peraturan. *Outputs* adalah hasil langsung dari aktivitas pemerintah yang dirancang untuk memenuhi tujuan kebijakan.

5) *Policy Outcomes* (Dampak-Dampak Kebijakan)

Akibat yang diterima masyarakat atas tindakan pemerintah, baik tindakan tersebut diinginkan maupun tidak diinginkan. *Policy outcomes* adalah dampak atau konsekuensi dari kebijakan publik pada masyarakat. Ini bisa berupa perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan yang terjadi sebagai hasil dari kebijakan yang diterapkan. *Outcomes* mencakup efek yang diinginkan (seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat) maupun efek yang tidak diinginkan (seperti dampak negatif terhadap kelompok tertentu).

Pembuatan kebijakan publik yang baik harus mempertimbangkan berbagai sifat kebijakan publik, mulai dari tuntutan-tuntutan kebijakan hingga dampak-dampak kebijakan. Setiap sifat kebijakan ini memainkan peran penting dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta dalam evaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang sifat-sifat ini, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, efektif, dan tepat

guna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan.

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan dan realisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau program tertentu. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai konsep implementasi kebijakan publik. Menurut Ripley dan Franklin yang dikutip Winarno (2016: 134), implementasi adalah apa yang terjadi setelah suatu undang-undang diundangkan yang memberikan kewenangan terhadap suatu program, kebijakan, manfaat, atau beberapa hasil nyata.

Fokus pada pelaksanaan program setelah undang-undang disahkan, dengan perhatian khusus pada keluaran nyata yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, menurut Grindle Winarno (2016: 135), terdapat pandangan bahwa tantangan implementasi adalah menciptakan hubungan yang memfasilitasi pencapaian tujuan politik oleh pemerintah pelaksana dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan menekankan pentingnya hubungan atau keterkaitan yang memudahkan realisasi tujuan kebijakan, serta dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, penerapan kebijakan publik sebagai tindakan atas suatu keputusan sebelumnya memerlukan upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu. Memahami implementasi sebagai serangkaian tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan, berdasarkan keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya

Menurut Winarno (2016: 133), implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan melibatkan penerapan undang-undang oleh banyak aktor, organisasi, prosedur, dan teknologi yang bekerja sama untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Hal ini untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program.

Implementasi kebijakan dapat dipandang dari beberapa dimensi yaitu dimensi proses yang melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk menerapkan kebijakan, dimensi *output* (keluaran) yang mana mengacu pada hasil konkret yang dihasilkan dari implementasi kebijakan dan

yang terakhir dimensi *outcome* (dampak) yang menunjukkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan. Dengan pemahaman ini, implementasi kebijakan publik dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih baik, memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dan dampak positif bagi masyarakat dapat diwujudkan.

Implementasi biasanya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan politik. Ada dua cara untuk melaksanakan suatu kebijakan nasional: yang pertama adalah implementasi langsung dalam bentuk program, yaitu kebijakan yang dilaksanakan secara langsung melalui program-program konkrit.

Program-program ini dirancang untuk memenuhi tujuan kebijakan dengan cara langsung memberikan layanan atau melakukan tindakan yang diperlukan. dan dapat melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan yang berarti bahwa kebijakan utama dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik. Ini sering diperlukan untuk kebijakan dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah yang membutuhkan panduan operasional yang lebih rinci. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah sering memerlukan peraturan pelaksanaan untuk memberikan penjelasan dan rincian operasional yang lebih spesifik¹⁴. Peraturan pelaksanaan ini bertujuan untuk:

- 1) Memastikan Kepatuhan: Menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi implementasi kebijakan, sehingga semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka.
- 2) Memberikan Petunjuk Teknis: Menyediakan panduan teknis yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dengan cara yang konsisten dan efektif.
- 3) Mengatasi Kesenjangan: Mengisi celah atau kekurangan dalam undang-undang utama dengan detail operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- 4) Meningkatkan Efisiensi: Memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan cara yang efisien dan hemat biaya,

¹⁴ Joko, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 3.

dengan mengurangi ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan.

Dengan memahami dan memilih langkah implementasi yang tepat, pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik, memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dengan cara yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan fisik dari kebijakan itu sendiri, tetapi juga merupakan hasil dari serangkaian keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks ini, penetapan tujuan dan sasaran kebijakan merupakan langkah awal yang penting sebelum implementasi dimulai. Menurut Edward III, implementasi kebijakan melibatkan sejumlah aktor yang terlibat dalam proses keputusan kebijakan. Para aktor ini bekerja sama untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses kegiatan yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai pihak dalam rangka mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

c. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam konteks ini, penelitian atau analisis implementasi kebijakan seringkali mengacu pada konsep-konsep yang diperkenalkan oleh teori George C. Edward III. Teori ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana kebijakan dipahami, diterjemahkan, dan dilaksanakan dalam konteks kebijakan publik. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang disoroti oleh teori ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif, sehingga mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan. Pendapat Edward III tentang kriteria penting dalam implementasi kebijakan menyoroti empat faktor kunci yang menjadi sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah:¹⁵

¹⁵ Subarsono AG, *analisis kebijakan publik (konsep, teori dan aplikasi)*, yogyakarta: pustaka pelajar.

1) Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Program atau kebijakan yang ingin dilaksanakan haruslah jelas dan dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara berbagai pihak terkait akan membantu memastikan bahwa tujuan dan prosedur pelaksanaan kebijakan dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat

2) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk finansial, manusia, maupun material, sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang memadai cenderung menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dengan lancar.

3) Disposisi

Sikap dan keterlibatan para pelaksana atau birokrasi dalam menjalankan kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Sikap yang positif, termasuk motivasi dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Sebaliknya, sikap yang negatif atau resistensi terhadap perubahan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur yang jelas dan efisien akan memfasilitasi koordinasi antar unit atau bagian dalam organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika terdapat hambatan atau kekakuan dalam tata aliran kerja, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat atau terlambat.

Dengan memperhatikan keempat faktor tersebut, pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dengan memastikan komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, dukungan dari para pelaksana, dan struktur organisasi yang efisien, proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

2. Peran Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan publik di berbagai tingkat, termasuk kepala desa, tokoh agama, RT, dan RW. Berikut adalah penjabaran mengenai peran kepala desa, tokoh agama, RT, dan RW dalam implementasi suatu kebijakan publik:

a. Kepala Desa

- 1) **Pengelolaan Administratif:** Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi desa, termasuk distribusi dana desa dan pelaksanaan program pembangunan.
- 2) **Penyampaian Informasi:** Menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat desa, menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik dan program pemerintah.
- 3) **Pemecahan Masalah:** Mengatasi berbagai masalah yang muncul di desa, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun masalah sosial lainnya.
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan melalui program-program pemberdayaan.

b. Tokoh Agama

- 1) **Pembinaan Moral:** Membimbing masyarakat dalam hal keagamaan dan moral, serta mendorong nilai-nilai kebajikan dan kerukunan.
- 2) **Sosialisasi Kebijakan:** Membantu menyosialisasikan kebijakan publik yang relevan dengan ajaran agama, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebersihan lingkungan.
- 3) **Mediator Konflik:** Berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.

c. Rukun Tetangga

- 1) **Pendataan dan Pelaporan:** Bertanggung jawab atas pendataan penduduk di tingkat RT dan melaporkan data tersebut ke tingkat RW dan desa.
- 2) **Koordinasi Kegiatan:** Mengkoordinasikan berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, dan acara sosial.
- 3) **Penyuluhan dan Pengawasan:** Melakukan penyuluhan mengenai program-program pemerintah dan kebijakan publik serta mengawasi pelaksanaannya di tingkat RT.

d. Rukun Warga

- 1) **Koordinasi Antar-RT:** Mengkoordinasikan kegiatan antar-RT dalam satu wilayah RW untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan.
- 2) **Fasilitasi Program Pemerintah:** Memfasilitasi pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat RW, seperti program kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
- 3) **Pemberdayaan Warga:** Mendorong partisipasi aktif warga dalam berbagai kegiatan pembangunan dan sosial di wilayah RW.

3. Mengaji

a. Pengertian Mengaji

Membaca Al-Qur'an adalah suatu kegiatan di mana seseorang yang beragama Islam membaca, memahami, dan mempelajari Al-Qur'an. Jika kegiatan ini merupakan doa bagi umat islam dan yang melaksanakan shalat mendapat pahala dari Allah. Membaca Al-Quran juga berarti belajar atau mempelajari.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Al-Quran". mempunyai beberapa arti:¹⁷

- 1) Belajar membaca tulisan Arab,
- 2) Belajar mempelajari Agama

Arti kata Quran dalam penelitian ini adalah proses dimana anak belajar membaca al-Quran di bawah bimbingan Ushtaz di Majelis Tarim. Oleh karena itu, minat membaca Al-Quran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi upaya membaca Al-Quran anak.

Membaca Al-Quran selalu disamakan dengan mengaji, mungkin inilah salah satu alasan mengapa orang tidak mau melakukannya, karena dinilai belum lancar ataupun tidak bisa mengaji. Meskipun membaca Quran sangat menyenangkan, membaca Alquran selain membaca juga berarti menafsirkan dan menafsirkan maknanya.

Mengapa kita perlu menafsirkan, Al-Quran tentunya dalam bahasa Arab sehingga sulit bagi kita orang Indonesia untuk memahami maknanya. Karena Quran berisi ayat indah dari Allah, beberapa di antaranya merupakan makna tersirat dari yang perlu dipahami. Mengaji sendiri bukanlah pilihan tapi

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), .747

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 508

mengaji itu perlu. Jika kita tidak mengaji, tentu semua amalan yang kita lakukan hanyalah kebohongan belaka. Allah SWT tidak akan menerimanya.¹⁸

Adapun di antara keutamaan membaca Al Qur'an dari sunnah Rasulullah SAW adalah:

- 1) Menjadi manusia yang terbaik
- 2) Kenikmatan yang tiada bandingnya
- 3) Al Qur'an memberi syafaat di hari kiamat
- 4) Pahala berlipat ganda
- 5) Dikumpulkan bersama para malaikat

Itulah beberapa anjuran dan manfaat membaca Al-Quran. Siapa pun yang membaca Al-Qur'an harus ingat bahwa ia mendapat pahala atas bacaannya, meskipun ia tidak memahami makna dan tafsirnya. Namun jika Dana memahaminya, pasti pahalanya akan lebih baik dan pahala yang Dana peroleh lebih banyak. Beberapa ulama telah menyebutkan beberapa hikmah khusus yang dapat diperoleh dari membaca Al-Qur'an, dan meskipun Dana tidak memahaminya, Dana tetap dapat mengambil manfaat darinya.¹⁹

b. Faktor yang Mempengaruhi Minat Mengaji

Tahapan perubahan perilaku individu yang relatif permanen yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, termasuk proses kognitif, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran mengaji. Perubahan ini dapat dicapai atau berhasil tergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi terbagi dalam dua kelompok:²⁰

1) Faktor Individual

Faktor individual yang mempengaruhi belajar, diantaranya:

a) Bakat

Setiap orang mempunyai bakat yang berbeda-beda. Tidak semua anak berbakat di semua bidang. Anak yang berbakat di bidang akademik belum tentu berbakat di bidang non-akademik seperti olahraga, begitu pula sebaliknya. Menurut Ahmadi dan Supriyono, "Bakat

¹⁸ Indra, Delfi, *Pelaksanaan Manajemen Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Provinsi Sumatera Barat (Study Komparatif Di Tiga Daerah)*, Jurnal al-Fikrah, Vol. II, No. 2, 2014

¹⁹ Indra, Delfi, *Pelaksanaan Manajemen*

²⁰ M.Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Karya, 2010),

adalah potensi/kemampuan dasar yang sudah ada sejak lahir.”. Bakat seorang anak biasanya berasal dari fitrah orang tuanya..²¹

Misalnya, jika orang tua berkecimpung di bidang seni, maka anak akan lebih cenderung mempelajari bidang yang berhubungan dengan seni.

b) Kecerdasan/Intelijensi

Menurut W. Stern yang dikutip Purwant, “Kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan baru dan menggunakan alat berpikir yang sesuai dengan tujuan tersebut.”. Menurut Sriyanthi, “Kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan baru dan menggunakan alat berpikir yang sesuai tujuan itu.”. “Kecerdasan sendiri berasal dari bahasa lain, yaitu kecerdasan yang berarti “mengorganisasikan”., “menghubungkan”., dan “menghubungkan”., yaitu menghubungkan atau menyeimbangkan satu sama lain. Oleh karena itu, semakin tinggi kapasitas intelektual seseorang, maka semakin besar kemungkinannya untuk sukses. Anak yang memiliki IQ lebih tinggi akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan yang ditemuinya. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelektual seseorang, maka semakin sulit memecahkan permasalahan sehingga semakin kecil pula peluang keberhasilannya.

c) Motivasi

Motivasi merupakan faktor yang membangkitkan minat. Tanpa motivasi tidak akan ada kegiatan belajar, karena proses belajar sangat memerlukan motivasi. Menurut Pak Mak seperti dikutip Pak Suryanthi, Pak Donald : Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditndani dengan munculnya keefektifan (emosi) dan reaksi dalam mencapai tujuan..²² Jadi motivasi merupakan suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang.

²¹ Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2013), .82

²² Lilik Sriyanti, *Psikologi Belajar*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 133

d) Sikap pribadi

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi emosional berupa kecenderungan untuk bereaksi secara positif dan negatif, atau dengan cara yang relatif tetap, terhadap benda, orang, benda, dan sebagainya. Sikap positif siswa, terutama terhadap guru dan mata pelajaran yang diajarkannya, merupakan bukti bahwa proses belajarnya dimulai dengan baik. Sebaliknya sikap negatif siswa terhadap guru dan mata pelajaran, apalagi jika dibarengi dengan kebencian terhadap guru dan mata pelajaran, dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa.²³

2) Faktor Sosial

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi belajar diantaranya sebagai berikut:

a) Keadaan Keluarga

Pendidikan informal, yang diakui dalam komunitas pendidikan, berasal dari rumah. Keluarga merupakan lndasan pertama bagi perkembangan kepribadian dan cara berpikir anak dalam proses belajar. Lingkungan rumah mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas belajar anak, karena ketegangan keluarga, karakteristik orang tua, struktur keluarga (lokasi rumah), bisnis keluarga, dan lain-lain dapat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Oleh karena itu, meskipun anak sudah bersekolah, tetap diharapkan pihak keluarga memberikan pendidikan dan suasana sejuk dan nyaman saat anak belajar di rumah.²⁴

b) Guru dan Cara Mengajar

Guru bertanggung jawab atas pendidikan di sekolah. Tanpa guru, proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tidak akan ada. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar karena tidak hanya melaksanakan tugasnya di dalam kelas saja, tetapi juga mempunyai peranan penting di sekolah dan masyarakat. Menurut Purwant, “Sikap dan kepribadian guru, tingkat pengetahuan guru, dan cara guru menyampaikan ilmu

²³ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 132

²⁴ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 30

tersebut kepada siswa juga menentukan hasil belajar yang dicapai anak,”. kata Syamsuddin. Guru mempunyai kepribadian yang baik karena menjadi role model bagi sekolah. “ Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.²⁵

c) Alat Pelajaran

Perangkat pembelajaran adalah alat yang dirancang untuk memperlancar proses belajar/mengajar pada khususnya dan proses pendidikan di sekolah/madrasah pada umumnya. Materi pendidikan adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan konsep/teori/metode kerja tertentu yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran atau konsultasi. Alat praktek adalah alat yang digunakan untuk magang di bidang sains, matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu lainnya.

d) Lingkungan Sosial

Ruang lingkup lingkungan sosial dalam hal ini meliputi masyarakat sekitar kampung pelajar, tetangga, teman bermain, sarana sosial dan keagamaan, prasarana, dan budaya. Lingkungan sosial yang tidak mendukung Kondisi kumuh, kondisi yang kurang, kekacauan dan lain-lain mempunyai dampak yang besar terhadap aktivitas belajar siswa. Di sisi lain, lingkungan setempat yang asri, damai, dan harmonis dapat membantu membimbing perkembangan psikologis anak ke arah yang lebih baik. Hal ini karena lingkungan ini membina hubungan kerja yang baik dan meningkatkan kesehatan pikiran pada anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelajar hidup dalam komunitas sosial yang heterogen. Oleh karena itu, kita kembali lagi pada unsur kekeluargaan yang merupakan landasan dasar bagi siswa untuk menyaring segala aktivitas yang ada di lingkungannya.²⁶

²⁵ Purwanto, Ngalm, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2010),

²⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013),

4. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

a. Pengertian Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

Gerakan masyarakat maghrib mengaji merupakan program nasional Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah dicanangkan di seluruh provinsi dan provinsi/kota se-Indonesia. Gerakan Masyarakat Baca Al-Quran Maghrib merupakan program yang menggalakkan pembacaan Al-Quran setelah salat Maghrib di kalangan masyarakat. Membaca dan mengaji telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, belakangan ini orang-orang mulai meninggalkan Al-Quran. Terkadang masjid dan musala sepi dan aktivitas pengajian sedikit. Masyarakat lebih asyik di depan televisi dibaningkan saat membaca Al-Quran.²⁷

b. Tujuan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji

Tujuan dari Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji ini adalah:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan pribadi dan sosial, menjalankan tradisi “mengaji Al-Quran”, melaksanakan tadarus setelah shalat Maghrib, dan mempelajari Al-Qur’an dan ilmu agama. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kualitas ketaatan beragama. Kebiasaan belajar agama.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia dan memastikan Al-Quran tetap dibaca dan dipelajari bahkan setelah lulus (Hatam) di Taman Pendidikan Al-Quran.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan membaca Al-Quran masyarakat.
- 4) Pembentukan sikap dan perilaku moral masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, diukur dengan keikhlasan, kejujuran, disiplin dan kesetiaan dalam mengamalkan ajaran agama, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi umat. Membatasi modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- 5) Membangun rekayasa sosial dengan semangat kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan pembentukan jati diri bangsa yang beradab bagi masyarakat madani.
- 6) Mengembangkan generasi manusia yang tangguh, setia, dan jujur, yang mampu menghadapi tantangan kehidupan

²⁷ Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta: Fokus Media, 2010.

modern pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan nasional dengan penuh prinsip dan ketabahan.

- 7) Menjadikan waktu maghrib untuk membaca Quran sebagai media untuk membangun tali silaturahmi yang kuat dalam membentuk kekeluargaan dan mempererat kerjasama antara orang tua, masyarakat termasuk unsur pendidikan, dan pemerintah.
- 8) Membiarkan masjid berkembang dengan mengumandangkan salat dan mengaji untuk meminimalisir dampak negatif media elektronik. Manfaat yang diperoleh anak dari membaca Al-Quran sangatlah besar. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat lain dari Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah anak untuk tidak mengikuti pergaulan bebas.
- 2) Mencegah anak dari pengaruh buruk dunia luar
- 3) Menjadikan anak lebih berbakti kepada orang tua
- 4) Menjadikan anak lancar dalam membaca Al-Qur'an.²⁸

c. Landasan Yuridis Program Masyarakat Maghrib Mengaji

Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji mengacu kepada landasan yuridis sebagaimana berikut ini:

- 1) Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- 4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Quran Bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Quran.
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/606/2011 tentang pembinaan pengajaran Tradisional Anak-anak.

²⁸ Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)

- 7) Pencanangan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji oleh Menteri Agama RI, Suryadarma Ali, tanggal 30 Maret 2011 di Jakarta.
- 8) Peraturan Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis mereview karya tulis yang berjudul tentang kebijakan Maghrib Matikan TV Ayo Mengaji dengan membahas aspek yang berbeda. Selain itu, untuk menghindari kesamaan isi, berikut penulis sajikan hasil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pengarang	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Respon Masyarakat Terhadap Reklame Sebagai Media Sosialisasi Ayo Mengaji (Studi Kasus Di Kelurahan Bintoro Demak)	Siti Fatimah	2018	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada keknik pengumpul an data dengan wawancara dan dokumenta si dan sama-sama membahas tentang program kebijakan mengaji	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu reklame sebagai media sosialisasi, sedangkan penelitian ini fokus pada pendukung dan penghambat implementasi kebijakan di Desa Balerejo.
2	Pemberdayaan Agama Masyarakat Melalui Gerakan “Maghrib	Rochanah	2019	Persamaan penelitian ini adalah menggunak an teknik pengambila	Perbedaan penelitin ini terdapat pada fokus penelitian yaitu

²⁹ Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)

No	Judul	Pengarang	Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Matikan TV Ayo Mengaji”. Di Kabupaten Demak			n data yang sama yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dan sama-sama membahas tentang program ayo mengaji.	pemberdayaan agama melalui program ayo mengaji, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan pada masyarakat.
3	Manajemen Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir	Mikrot	2021	Persamaan penelitian ini pada teknik pengambilan data yang menggunakan wawancara dan dokumentasi dan sama-sama membahas tentang program ayo mengaji.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu tentang manajemen waktu membaca, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pada masyarakat.
4	Implementasi Program Maghrib Mengaji sebagai Sarana Pembelajaran Al-Quran pada Anak Usia Dini: Studi	Hisny Fajrussalam dkk	2023	Persamaan penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sama-	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi yaitu di teliti di Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian ini diteliti di Desa Balerejo

No	Judul	Pengarang	Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Deskriptif Kualitatif di TPQ Al Ittihad Kab. Cirebon			sama meneliti tentang implementasi program maghrib mengaji.	Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
5	Magrib Mengaji Sebagai Solusi Meningkatkan Minat Membaca Al-Qu'an Di Nagari Kuranji Hilir Korong Lampanjan g Kecamatan Sungai Limau	Debby Oktaviani Andana	2022	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang program maghrib mengaji.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu tentang minat membaca Al-Quran, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pada masyarakat.
6	Revolusi Mental melalui Penerapan Kebijakan Gerakan Magrib Mengaji di Kabupaten Lebak	Jumanah	2020	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan gerakan maghrib mengaji dan taknik pengumpulan data yang menggunakan	Perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitan serta waktu penelitian

No	Judul	Pengarang	Tahun	Persamaan	Perbedaan
				observasi, wawancara, dan dokumenta si	
7	Efektivitas program magrib mengaji dalam meningkatkan kelancaran membaca al-Qur'an anak di Desa Perkebunan Tanah Gambus Kabupaten Batu Bara	Fikri Maulana dan Ihsan Satrya Aazhar	2023	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengambilan data yang sama yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dan sama-sama membahas tentang program ayo mengaji	Perbedaan peneliti ini terdapat pada fokus penelitian yaitu efektivitas program maghrib mengaji, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan pada masyarakat

C. Kerangka Berfikir

Sejak awal penyebaran agama Islam, kegiatan mengaji telah menjadi salah satu bentuk ibadah yang sangat penting bagi masyarakat muslim. banyak tempat ibadah seperti surau, langgar, mushalla, masjid, dan lainnya yang menjadi tempat ramai untuk kegiatan mengaji pada sore hari hingga setelah maghrib, Namun dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat, hal ini telah memiliki dampak negatif pada kehidupan, terutama pada generasi muda. banyak masyarakat yang lebih memilih menikmati perkembangan teknologi seperti televisi daripada melibatkan diri dalam kegiatan mengaji. kondisi ini menyebabkan kegiatan mengaji mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang dikenal sebagai gerakan matikan TV ayo mengaji. tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghidupkan kembali budaya mengaji pada waktu maghrib seperti yang telah dilakukan sejak awal penyebaran agama Islam. selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk

menciptakan masyarakat yang religius, dengan memiliki akhlak dan moral yang baik, serta mempersiapkan generasi yang memahami ajaran agama islam. berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

